

Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Rian Ismi Wardana*, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Lince Magriasti, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the intersection of political economy and gender through an in-depth case study of women's roles in economic development in Indonesia. The research addresses the critical question of how women's participation in economic activities influences and is influenced by broader economic policies and political structures. Employing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis with qualitative interviews to provide a comprehensive view of the subject. The findings reveal that while there have been significant strides in women's economic participation, substantial barriers remain due to entrenched patriarchal norms and inadequate policy support. The study concludes that for Indonesia to achieve sustainable economic growth and gender equality, a more inclusive approach to economic policymaking is essential. This involves not only addressing structural barriers but also fostering an environment where women's contributions are recognized and valued. The research underscores the importance of integrating gender perspectives into economic policies to enhance both economic and social outcomes.

ARTICLE HISTORY

Received 19/06/2024

Revised 30/06/2024

Accepted 08/07/2024

Published 15/07/2024

KEYWORDS

Political economy; gender; women's roles; economic development; Indonesia.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ rianismi30@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam dinamika ini. Meskipun kontribusi perempuan terhadap ekonomi nasional semakin diakui, berbagai tantangan struktural dan kebijakan masih membatasi partisipasi penuh mereka. Analisis ekonomi politik dan gender menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan struktur sosial mempengaruhi peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Perempuan di Indonesia terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, hingga layanan. Namun, akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit dan lahan, serta kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan, masih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Hambatan ini tidak hanya mengurangi produktivitas ekonomi, tetapi juga mempertahankan ketidaksetaraan gender yang telah lama ada. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional (World Bank, [2012](#)).

Analisis ekonomi politik memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah, institusi ekonomi, dan norma sosial mempengaruhi peran perempuan dalam ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tidak sensitif gender sering kali memperkuat ketidaksetaraan yang ada, sementara kebijakan yang inklusif dapat membuka peluang baru bagi perempuan. Misalnya, program-program mikro finansial yang dirancang khusus untuk perempuan telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan di berbagai daerah di Indonesia (Mayoux, [2006](#)). Selain itu, reformasi kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi ekonomi nasional.

Keberhasilan kebijakan tersebut juga sangat bergantung pada konteks politik dan sosial di mana kebijakan tersebut diterapkan. Dalam banyak kasus, resistensi terhadap perubahan normatif dan struktural menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji kebijakan dan program yang ada, tetapi juga dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi implementasi dan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan mendalam tentang bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada konteks politik dan sosial di mana kebijakan tersebut diterapkan. Sebagai negara dengan kompleksitas politik yang tinggi dan berbagai dinamika sosial yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Salah satu hambatan utama adalah resistensi terhadap perubahan normatif dan struktural, yang sering kali berasal dari nilai-nilai budaya yang patriarkal dan konservatif yang masih kuat dalam masyarakat (Robinson, [2009](#)). Resistensi ini dapat berasal dari berbagai level, mulai dari individu hingga institusi, yang secara kolektif dapat memperlambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam sektor ekonomi.

Di sisi lain, dinamika politik juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan gender. Representasi perempuan dalam lembaga politik dan pembuat kebijakan sering kali menentukan sejauh mana isu-isu gender mendapat perhatian dan diintegrasikan ke dalam kebijakan publik (Hillman, [2010](#)). Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki peran yang signifikan dalam politik, kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan cenderung lebih banyak dihasilkan (Beaman et al., [2009](#)). Namun, meskipun ada peningkatan jumlah perempuan dalam politik Indonesia, tantangan tetap ada dalam hal pengaruh dan pengambilan keputusan yang efektif.

Selain faktor politik, dinamika sosial juga memainkan peran krusial dalam implementasi dan keberhasilan kebijakan kesetaraan gender. Di Indonesia, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak gender merupakan elemen kunci yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Pendidikan, khususnya pendidikan perempuan, memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka. Studi menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang layak, upah yang lebih tinggi, dan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, baik di rumah tangga maupun di masyarakat (Murniati, [2015](#)). Hal ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan perempuan sebagai bagian dari strategi kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender.

Kesadaran masyarakat tentang hak-hak gender juga berperan dalam membentuk lingkungan yang mendukung implementasi kebijakan. Advokasi gender yang efektif dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengubah norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan. Kampanye kesadaran dan pendidikan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media, dapat mempercepat perubahan sosial yang diperlukan untuk mendukung kebijakan kesetaraan gender (Sudarsono, [2018](#)). Misalnya, program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Dukungan komunitas juga tidak kalah pentingnya. Komunitas yang inklusif dan mendukung dapat menjadi katalisator bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Program pemberdayaan berbasis komunitas yang fokus pada penguatan kapasitas perempuan dan penyediaan dukungan sosial dapat membantu mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses peluang ekonomi. Inisiatif seperti kelompok usaha bersama, pelatihan keterampilan, dan dukungan keuangan mikro telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan di berbagai daerah di Indonesia (Yulianti, [2017](#)).

Namun, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan faktor-faktor sosial ini ke dalam kebijakan publik secara menyeluruh. Kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat sering kali gagal mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam perumusan kebijakan kesetaraan gender. Ini termasuk melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

Dalam rangka mencapai hasil yang berkelanjutan, diperlukan sinergi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, dan advokasi gender. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang

lebih efektif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yaitu: Kusumawardhani (2013) menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, tetapi hambatan struktural seperti akses terbatas ke pendidikan masih menghalangi kontribusi penuh perempuan terhadap pembangunan ekonomi (Kusumawardhani, [2013](#)). Murniati (2015) mengeksplorasi dampak pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta menekankan pentingnya program pendidikan yang responsif gender (Murniati, [2015](#)). Sudarsono (2018) membahas peran advokasi dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap kebijakan kesetaraan gender, menemukan bahwa kampanye advokasi yang efektif dapat mengubah norma sosial yang diskriminatif dan mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, serta menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam advokasi gender (Sudarsono, [2018](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi penuh dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan mengkaji kebijakan ekonomi yang ada serta akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada peran advokasi gender dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan penerimaan terhadap kebijakan kesetaraan gender. Dengan mengevaluasi efektivitas kampanye advokasi dan keterlibatan aktif masyarakat serta organisasi non-pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana upaya advokasi dapat mengubah norma-norma sosial yang diskriminatif dan mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dari perspektif ekonomi politik dan gender. Metode ini menggabungkan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei nasional seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup partisipasi tenaga kerja perempuan, tingkat pendidikan, dan distribusi pendapatan. Data ini dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan partisipasi ekonomi perempuan dan hambatan-hambatan yang mereka hadapi (Creswell, [2014](#)).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perempuan pekerja, pengusaha, pembuat kebijakan, dan aktivis gender. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman pribadi perempuan dalam mengakses peluang ekonomi dan tantangan yang mereka hadapi. Diskusi kelompok terfokus digunakan untuk memahami perspektif kolektif dan dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesetaraan gender. Data kualitatif ini dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari wawancara dan diskusi (Braun & Clarke, [2006](#)). Kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif ini memberikan gambaran yang holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan memungkinkan penelitian ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hambatan Struktural terhadap Partisipasi Ekonomi Perempuan

Partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Salah satu hambatan utama adalah kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif terhadap kebutuhan perempuan. Kebijakan-kebijakan yang ada seringkali tidak mempertimbangkan dimensi gender, sehingga tidak memberikan dukungan yang memadai bagi perempuan untuk mengatasi tantangan khusus yang mereka hadapi di

dunia kerja. Misalnya, kurangnya kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, seperti cuti melahirkan yang memadai dan fasilitas penitipan anak, membuat perempuan kesulitan untuk tetap aktif dalam angkatan kerja setelah memiliki anak (Widyastuti, [2017](#)).

Akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan juga merupakan hambatan besar yang menghalangi partisipasi ekonomi perempuan. Pendidikan yang tidak merata dan kurangnya kesempatan pelatihan bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, mengakibatkan kesenjangan keterampilan yang signifikan. Hal ini membatasi peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik. Menurut data BPS (2021), tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada rendahnya representasi perempuan dalam posisi manajerial dan profesional. Kurangnya akses ini juga membuat perempuan lebih rentan terhadap pekerjaan di sektor informal yang kurang terlindungi oleh regulasi dan memiliki upah yang lebih rendah (Badan Pusat Statistik, [2021](#)).

Kesenjangan dalam akses pendidikan dan pelatihan ini berdampak langsung pada kontribusi ekonomi perempuan. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah cenderung terbatas pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang lebih rendah, yang menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidaksetaraan dalam pendidikan juga memperkuat norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan, sehingga memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan (Murniati, [2015](#)).

Kebijakan ekonomi yang ada harus diubah untuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Ini termasuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan, serta memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Program-program seperti beasiswa khusus untuk perempuan, pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, dan kampanye kesadaran untuk mengubah norma sosial yang mendiskriminasi perempuan, sangat penting untuk mengatasi hambatan struktural ini (Handayani, [2018](#)). Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan harus holistik, mencakup reformasi kebijakan yang komprehensif dan pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan, untuk memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi secara penuh dan setara dalam pembangunan ekonomi.

Selain mengubah kebijakan ekonomi untuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang memastikan tempat kerja yang aman dan ramah bagi perempuan, termasuk perlindungan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Lingkungan kerja yang aman dan kondusif akan mendorong lebih banyak perempuan untuk bergabung dan bertahan dalam angkatan kerja, meningkatkan partisipasi dan produktivitas mereka secara keseluruhan (Supriyanto, [2019](#)).

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan pengusaha dan manajer mengenai pentingnya keberagaman gender dalam tim kerja. Penelitian menunjukkan bahwa tim yang beragam gender cenderung lebih inovatif dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik (Kusuma, [2016](#)). Oleh karena itu, program pelatihan dan *workshop* tentang inklusi gender di tempat kerja harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan. Dengan demikian, pengusaha dapat lebih menghargai kontribusi perempuan dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender.

Peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga krusial dalam mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender. Pemerintah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, seperti dukungan untuk kewirausahaan perempuan. Program ini dapat mencakup akses ke modal, pelatihan bisnis, dan jaringan mentor yang kuat. Kewirausahaan perempuan tidak hanya meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Hartati, [2017](#)).

Di sisi lain, organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan mendukung implementasi kebijakan yang adil. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada benar-benar dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, mereka juga dapat menyediakan layanan pendukung bagi perempuan yang membutuhkan, seperti pusat bantuan hukum, konseling, dan pelatihan keterampilan (Lestari, [2018](#)).

Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung partisipasi ekonomi perempuan. Nilai-nilai keluarga yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan sangat penting untuk memotivasi perempuan dalam mengejar karier dan berkontribusi secara ekonomi. Kampanye kesadaran di tingkat komunitas yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dapat membantu mengubah norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam ekonomi.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, upaya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dapat lebih efektif. Reformasi kebijakan yang inklusif, lingkungan kerja yang mendukung, program pemberdayaan, dan advokasi yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi penuh dan setara dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Peran Advokasi Gender dalam Mengubah Norma Sosial dan Implementasi Kebijakan

Advokasi gender memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan penerimaan terhadap kebijakan kesetaraan gender di Indonesia. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan masyarakat sipil telah menjalankan berbagai kampanye untuk mengubah norma-norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu strategi yang efektif adalah pelibatan komunitas dalam kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat. Sebagai contoh, LSM Kalyanamitra telah melakukan kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender, sehingga pesan tersebut dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas (Kalyanamitra, [2018](#)).

Kampanye advokasi yang dilakukan oleh LSM dan masyarakat sipil sering kali menggunakan pendekatan multi-sektoral, termasuk media massa, pendidikan, dan pelatihan. Yayasan Jurnal Perempuan, misalnya, secara aktif menggunakan media cetak dan digital untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender. Mereka juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Yayasan Jurnal Perempuan, [2017](#)). Pendekatan ini efektif karena menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan advokasi.

Namun, tantangan dalam advokasi gender tetap signifikan. Resistensi dari kelompok konservatif yang mempertahankan norma-norma patriarkal sering menjadi hambatan utama dalam perubahan sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, sering kali menghambat pelaksanaan kampanye advokasi yang berkelanjutan. Misalnya, meskipun ada upaya untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat (Kusumaningrum, [2016](#)).

Studi kasus keberhasilan dalam advokasi gender tidak hanya terlihat dari kampanye global seperti "HeForShe" tetapi juga dari inisiatif lokal yang memberikan dampak signifikan. Misalnya, program "Perempuan Kepala Keluarga" (PEKKA) yang diinisiasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia bertujuan untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga melalui peningkatan keterampilan, akses ke sumber daya, dan dukungan komunitas. Program ini berhasil meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan memperkuat posisi mereka dalam komunitas. Dampaknya terlihat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan, serta perubahan sikap di masyarakat yang mulai mengakui kontribusi perempuan sebagai pemimpin rumah tangga (Koalisi Perempuan Indonesia, [2017](#)).

Selain itu, advokasi gender juga diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan. Inisiatif seperti pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di tingkat desa telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lokal. Pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi seperti The Asia Foundation fokus pada peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan, yang membantu mereka untuk lebih aktif dan berpengaruh dalam proses legislasi dan kebijakan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan pelatihan lebih percaya diri dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan komunitas mereka (The Asia Foundation, [2015](#)).

Advokasi gender juga dipromosikan melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah mengadopsi kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Program-program

seperti "*Workplace Gender Equality*" yang diinisiasi oleh perusahaan multinasional menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja-kehidupan, cuti melahirkan, dan peluang karier yang setara dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusif gender tidak hanya melihat peningkatan kinerja tetapi juga reputasi yang lebih baik di mata publik dan investor (Gender at Work, [2016](#)).

Namun, meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi budaya dan sosial terhadap perubahan yang mendukung kesetaraan gender. Banyak komunitas masih memegang teguh norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, advokasi gender harus terus beradaptasi dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi resistensi ini, termasuk melalui dialog yang konstruktif dengan pemimpin komunitas dan kampanye kesadaran yang lebih luas (Robinson, [2009](#)).

Secara keseluruhan, advokasi gender yang efektif memerlukan pendekatan yang beragam dan komprehensif, mencakup pendidikan, pelatihan, kolaborasi dengan sektor swasta, serta adaptasi terhadap konteks lokal. Dengan terus mendorong inisiatif yang inovatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, advokasi gender dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam norma sosial dan implementasi kebijakan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, analisis ekonomi politik dan gender dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam partisipasi ekonomi perempuan, hambatan struktural dan norma sosial yang diskriminatif masih menghalangi kontribusi penuh mereka. Kebijakan ekonomi yang inklusif dan program pendidikan serta pelatihan yang responsif gender sangat penting untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi. Advokasi gender yang efektif, baik melalui kampanye kesadaran publik, pendidikan, maupun kolaborasi dengan sektor swasta, memainkan peran kunci dalam mengubah norma sosial yang diskriminatif dan mendukung implementasi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran perempuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kedua, penelitian ini lebih banyak fokus pada analisis kebijakan dan program yang sudah ada, sehingga mungkin kurang mengidentifikasi inovasi atau pendekatan baru yang belum banyak diterapkan. Terakhir, adanya resistensi budaya dan sosial terhadap perubahan yang mendukung kesetaraan gender dapat menyebabkan hasil advokasi tidak selalu langsung terlihat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan mencakup berbagai konteks lokal sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Survei Angkatan Kerja Nasional*. Jakarta: BPS.
- Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2009). Political reservation and substantive representation: Evidence from Indian village councils. *Brookings Institution Press*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Gender at Work. (2016). *Workplace gender equality: Policy and practice*. New York: Gender at Work.
- Handayani, T. (2018). *Kesetaraan gender dalam pendidikan dan pelatihan vokasional di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartati, S. (2017). *Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan: Studi kasus di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hillman, A. L. (2010). Expressive behavior in economics and politics. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 403-418. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2010.02.002>

- Koalisi Perempuan Indonesia. (2017). *Laporan program perempuan kepala keluarga (PEKKA)*. Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia.
- Kusuma, H. (2016). *Inklusi gender dalam dunia kerja: Manfaat dan tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D. (2018). *Peran LSM dalam advokasi hak-hak perempuan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mayoux, L. (2006). Women's empowerment through sustainable micro-finance: Rethinking 'best practice'. *Gender & Development*, 4(2), 56-74. <https://doi.org/10.1080/741921858>
- Murniati, A. (2015). *Pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia: Antara teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. New York: Routledge.
- Sudarsono, H. (2018). *Advokasi gender dalam perspektif sosial dan politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyanto, A. (2019). *Kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender: Studi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- The Asia Foundation. (2015). *Peningkatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan lokal*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Widyastuti, S. (2017). *Analisis kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- World Bank. (2012). *World development report 2012: Gender equality and development*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-5>
- Yulianti, N. (2017). *Pemberdayaan perempuan melalui program mikrofinansial di pedesaan*. Bandung: Alfabeta.